

Memultiliterasikan Warga*

Pangesti Wiedarti**

Beberapa studi menunjukkan kemampuan membaca siswa Indonesia hingga orang dewasa berada pada level rendah. *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS, 2011) menempatkan Indonesia pada level ke-42 dari 45 negara, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia bagi siswa SD kelas IV yang diadakan Puspendik Kemdikbud (2016) menunjukkan kemampuan membaca domain nonsastra 43,34%, sedangkan domain sastra 27,65%. *Programme for International Student Assessment* (PISA) bagi siswa usia 15 tahun (kelas IX/X) menempatkan Indonesia pada level ke-57 (65 negara peserta, tahun 2009), level ke-64 (65 negara peserta, tahun 2012), dan tetap pada level ke-64 (72 peserta, tahun 2015). Sementara itu, kemampuan membaca orang dewasa berdasarkan hasil *The Programme for the International Assessment of Adult Competencies* (PIACC, Maret 2016) juga dalam posisi rendah, level terbawah dari negara peserta. Data sejak SD hingga orang dewasa tampak ajek.

Berikutnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, di penghujung Pertemuan Tahunan Dana Moneter International (IMF) dan Bank Dunia 2017, di Washington DC, US (14 Oktober 2017) mengatakan kualitas pendidikan di Indonesia sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju khususnya negara-negara dalam kawasan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Indonesia memerlukan 45 tahun agar mencapai tingkat kemampuan membaca setara mereka, sedangkan untuk sains diperlukan 75 tahun. Benarkah demikian?

Rentang waktu 45 tahun dan 75 tahun itu tidak akan terjadi jika upaya gerakan literasi yang dilakukan Kemendikbud sejak akhir 2015 melalui Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan

Literasi Nasional (Oktober 2017) didukung oleh seluruh masyarakat dalam berbagai peran. Sistem sudah dibangun oleh beberapa pemangku kepentingan, juga dukungan Presiden Jokowi tentang bebas ongkos kirim buku tiap bulan pada tanggal 17 oleh PT Pos Indonesia. Namun, pemangku kepentingan dari pihak kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) belum maksimal dalam mendukung warganya menjadi multiliterat.

Didukung program USAID Prioritas, dari 93 pemerintah daerah (pemda), 18 kabupaten dan satu kota Mitra Program USAID dinyatakan berpredikat amat baik/baik dan mendapatkan penghargaan Literasi Prioritas dari Mendikbud pada 20 Maret 2017.

Beberapa kapemda juga membangun warganya agar menjadi literat. Namun, para kapemda ini tidak akan dapat membangun daerahnya secara maksimal jika hanya dengan mengandalkan stafnya. Masyarakat harus dilibatkan dan membuat mereka menjadi multiliterat merupakan modalnya.

Multiliterasi

Multiliterat berarti 'melek dalam berbagai hal', minimal mencakup literasi: baca-tulis, sains, numerasi, media, finansial, budaya dan kewargaan. Selain literasi dasar (*World Economy Forum*, 2015) ini, perlu ditambahkan literasi kriminal, kesehatan, dan keselamatan (jalan, bencana). Selain itu, perlu diimbangi dengan **kompetensi** untuk memecahkan masalah kompleks, meliputi kemampuan berpikir kritis/memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, **penguatan pendidikan karakter** beradaptasi pada lingkungan yang dinamis juga perlu dilakukan dengan memfokuskan pada lima karakter utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas (Perpres Nomor 87 Th 2017). Multiliterat, kompetensi, dan karakter sebagai paradigma pembangunan Indonesia diimplementasikan pada konteks keluarga, sekolah,

dan masyarakat. Warga setiap pemda semestinya mempunyai kemampuan multiliterat yang dicapai secara bertahap. Indikator pencapaiannya dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12, yang disesuaikan dengan konteks pemda terkait.

Apa yang terjadi pada kondisi kemampuan multiliterat warga yang tidak/kurang terbina? Setiap warga tidak cukup peka terhadap kondisi daerahnya, dan kurang mempunyai keinginan berkontribusi membangun daerahnya akibat ketidaktahuannya. Jika demikian halnya, ada kecenderungan warga tidak akan dapat maju dalam sekian aspek kehidupan sesuai yang didambakan.

Unsur Pokok Pengembangan Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada butir b, dinyatakan bahwa "penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11, dinyatakan: (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya, pada Pasal 12, dinyatakan: (1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a) **pendidikan**; b) **kesehatan**; c) **pekerjaan umum dan penataan ruang**; d) **perumahan rakyat dan kawasan permukiman**; e) **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**; dan f. **sosial**. Indikator ini dapat dikaitkan dengan indikator penguasaan literasi dasar.

(2) *Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a) **tenaga kerja**; b) **pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**; c) **pangan**; d) **pertanian**; e) **lingkungan hidup**; f) **administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**; g) **pemberdayaan masyarakat dan desa**; h) **pengendalian penduduk dan keluarga berencana**; i) **perhubungan**; j) **komunikasi dan informatika**; k) **koperasi, usaha kecil, dan menengah**; l) **penanaman modal**; m) **kepemudaan dan olahraga**; n) **statistik**; o) persandian; p) **kebudayaan**; q) **perpustakaan**; dan r) kearsipan.

(3) *Urusan Pemerintahan Pilihan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a) **kelautan dan perikanan**; b) **pariwisata**; c) **pertanian**; d) **kehutanan**; e) **energi dan sumber daya mineral**; f) **perdagangan**; g) **perindustrian**; dan h) **transmigrasi**.

Ketiga aspek di atas dapat menjadi indikator pembangunan suatu daerah, ketercapaian sudah didapatkan atau belum, sesuai konteks daerah.

Pemanfaatan Videotron Informatif

Butir-butir dalam Pasal 12 pada umumnya dipahami masyarakat sebagai tanggung jawab kepala daerah dan jajarannya. Padahal, sesungguhnya ketika warga ikut terlibat aktif, kondisi dimungkinkan bisa interaktif karena warga mengetahui kondisi daerahnya dan dapat diminta aktif terlibat dalam membangun daerahnya sesuai kapasitas masing-masing.

Agar warga suatu daerah peduli, informasi tentang tiga urusan di atas perlu disampaikan ke masyarakat. Media yang dapat digunakan adalah videotron (atau spanduk; jika pemda belum dapat menyediakan fasilitas videotron) karena media ini dapat menyampaikan materi secara visual-dinamik di area publik. Namun, penempatannya harus pada area strategis yang tidak menyebabkan distraktor, misalnya pada pinggir jalan/area keramaian yang memicu kecelakaan. Area pusat perbelanjaan dan area layanan publik, seperti halaman rumah sakit, halaman kantor perbankan, halaman bandara, halaman perkantoran pemda, dll. dapat menjadi alternatif penempatan videotron ini. Warga dapat melihat informasi nirsuara ini (hanya mengandalkan aspek visual) karena suara dapat menjadi distraktor.

Informasi berbagai urusan pemda disajikan secara komunikatif dan menarik dalam bentuk infografis yang mudah dipahami awam (literasi media/visual). Warga perlu mengetahui ihwal pendidikan di lingkungannya, misalnya jenjang pendidikan warga dan berbagai hal terkait pembangunan SDM. Aspek kesehatan: penyakit yang rawan diderita masyarakat dan berpotensi menjadi bencana nasional (seperti kasus difteri), mengenali gejala, proses penularan, penanggulangan, pencegahan, dsb. Pada pokoknya, sekian aspek yang terkait dengan kehidupan warga dan keberlangsungan pemda di dalam menegakkan dan mempertahankan kondisi ideal yang diuraikan pada tiga urusan di atas, perlu diketahui masyarakat. Himbauan agar

mereka ikut aktif berperan dapat dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk berbagai kegiatan dengan harapan warga dapat berperan multiliterat.

Pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI) setempat dapat mendukung keberlangsungan program komunikasi pemda dan masyarakat dengan membayar pemasangan iklan produk mereka. Dana dari sini dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan penayangan informasi.

Dialog interaktif dapat dilakukan dengan menyertakan media komunikasi langsung antara warga dan staf pemda berdasarkan informasi yang diterima warga melalui videotron. Kepedulian dan berpikir kritis mereka diharapkan terlatih dalam dialog ini.

Selain hal di atas, hal penting lain yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat tata wilayah menyajikan informasi tertulis yang ramah dan memadai agar pendatang tidak mengalami kesulitan di dalam berkegiatan di wilayah tersebut.

Efektivitas media dapat diketahui staf pemda dengan melakukan asesmen terhadap media komunikasi yang digunakan. Badan Pusat Statistik lokal dan Bappeda dapat menjadi pendukung utama dalam upaya memultiliteratkan warganya.

=====

*Akan disampaikan kepada Wapres Jusuf Kalla, Menteri Bappenas, Menkeu, Dirjen Bangda, dan para narasumber pada Rakornas Bidang Perpustakaan 2018, di Jakarta, 26-28 Maret 2018.

**Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud (2016, 2017, 2018)
Dosen Sastra Indonesia, FBS, Universitas Negeri Yogyakarta,
pangesti@uny.ac.id